

**ANALISIS YURIDIS-KONSTITUSIONAL ATAS
KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM KEBIJAKAN
PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

(Studi Analisis Pada Kantor Pertanahan Kota Medan Tentang
Pembebasan Lahan di Sungai Bedera, Kota Medan)

T E S I S

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam
Sumatera Utara*

Oleh :

HAFIZA AZURA
NPM : 71230123041

Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara



MAGISTER ILMU HUKUM

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

**ANALISIS YURIDIS-KONSTITUSIONAL ATAS
KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM KEBIJAKAN
PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

(Studi Analisis Pada Kantor Pertanahan Kota Medan Tentang
Pembebasan Lahan di Sungai Bedera, Kota Medan)

T E S I S

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam
Sumatera Utara*

Oleh :

HAFIZA AZURA
NPM : 71230123041

Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Medan, November 2025

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof.Dr. Marzuki, S.H.,M.Hum.

Dr. Ibnu Affan S.H., M.Hum.

Penulis,
Hafiza Azura

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	7
1. Kerangka Teori	7
2. Kerangka Konsep	36
F. Keaslian Penelitian	51
G. Metode Penelitian.....	54
1. Jenis Penelitian	54
2. Metode Pendekatan	55
3. Alat Pengumpulan Data	57
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	58
5. Analisis Data	62
BAB II : PENGATURAN HUKUM PEMBEBASAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM SISTEM HUKUM	

	INDONESIA DAN KESESUAIANNYA DENGAN PRINSIP-PRINSIP KONSTITUSIONAL.....	63
	A. Pengaturan Hukum Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Sistem Hukum Indonesia.....	63
	B. Kepentingan Umum sebagai Dasar Pembebasan Tanah.....	74
	C. Prinsip-Prinsip Konstitusional dalam Pembebasan Tanah.....	83
BAB III	: KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBEBASAN TANAH DI SUNGAI BEDERA, KOTA MEDAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF YURIDIS-KONSTITUSIONAL.....	97
	A. Kewenangan Badan Pertanahan dalam Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum	97
	B. Kewenangan Pemerintah Kota Medan dan Balai Wilayah Sungai Sumatera II dalam Pembebasan Tanah	112
	C. Koordinasi Kewenangan Antar Lembaga dalam Pembebasan Tanah di Sungai Bedera	124
BAB IV	: IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM KEBIJAKAN PEMBEBASAN TANAH DI SUNGAI BEDERA, KOTA MEDAN BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA	137
	A. Pelaksanaan Pembebasan Tanah di Sungai Bedera oleh Badan Pertanahan Kota Medan.....	137
	B. Keadilan dalam Penetapan dan Pemberian Ganti Kerugian kepada Masyarakat	156
	C. Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat dalam Pembebasan Tanah di Sungai Bedera	175
BAB V	: PENUTUP	180
	A. Kesimpulan	180
	B. Saran	183

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Majid, Pokok-Pokok Fiqh Muamalah Dan Hukum Kebendaan Dalam Islam, IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 1986.
- Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum di dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Andre Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls, Kanisius, Yogyakarta, 2001.
- Aristoteles, Teori Keadilan dalam Perspektif Hukum, Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Azmi Fendri, Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Carl Friedrich, Man and His Government, McGraw-Hill, New York, 1963.
- David E. Apter, Pengantar Analisa Politik, LP3ES, Jakarta, 1987.
- Djuhaendah Hasan, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1996.
- H.M. Arba, Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Sinar Grafika, Jakarta, 2021.
- Inu Kencana Syafie, Ekologi Pemerintahan, PT Pertja, Jakarta, 1998.
- Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004.
- J.G. Brouwer, A.E. Schilder, A Survey of Dutch Administrative Law, Ars Aequilibrari, Nijmegen, 1998.
- James Anderson, Public Policy Making, Second Edition, Holt Rinehart and Winston, New York, 1979.

- John M. Achols, Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, Cetakan XII, Gramedia, Jakarta, 1984.
- Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan 3, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Kamal Hidjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- M. Ramdhan, Metode Penelitian, Cipta Media Nusantara, Jakarta, 2021.
- M. Rahardjo, Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif, UIN Jakarta Press, Jakarta, 2011.
- Malayu S.P. Hasibuan, Organisasi dan Motivasi, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Max Weber, Rationality and Modernity, Sam Whimster (Ed.), Routledge, London, 2014.
- Mudhakir Iskandar Syah, Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Umum, Permata Aksara, Jakarta, 2015.
- Muhammad Rohidin Pranadjaja, Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Neong Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Pendekatan Positivistic, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama, Rake Serasin, Yogyakarta, 1998.
- Paulus Effendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan Kesembilan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Prajudi Atmosudirjo, Administrasi dan Manajemen Umum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Rina Yulianti, Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir, Scopindo Media Pustaka, Jakarta, 2022.

Roscoe Pound, Pengantar Filsafat Hukum, Terjemahan Muhammad Radjab, Bhatara Karya Aksara, Jakarta, 1982.

Selfianus Laritmas, Ahmad Rosidi, Teori-Teori Negara Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2024.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

Tahir, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Alvabeta, Bandung, 2014..

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum beserta perubahannya.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

C. Jurnal/Artikel/Disertasi/Tesis

Alim, S., "Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Terhadap Tanah Hak Milik", *Gorontalo Law Review*, Vol. 7 No. 1, 2024.

Ananda, R.G., et.al., "Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendaftaran Tanah untuk Mewujudkan Kepastian Hukum", *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol. 2 No. 6, 2024.

Ardani, M.N., "Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan untuk Menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Tugas dan Fungsi

Badan Pertanahan Nasional", *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2 No. 3, 2019.

Asy'ari, Q., "Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pasca Bencana di Kabupaten Pamekasan (Studi Kasus Banjir, Longsor dan Kekeringan di Pamekasan 2007)", *J-MACC: Journal of Management and Accounting*, Vol. 1 No. 2, 2018.

Athallah, F.B., et.al., "Hak Pemilikan Satuan Rumah Susun di Atas Tanah Hak Guna Bangunan Melalui Perjanjian Sewa Menyewa di Atas Tanah Hak Milik", *Jurnal Batavia*, Vol. 1 No. 1, 2024.

Atmaka, F.X., "Evaluasi Normalisasi Sungai Bengawan Solo Hulu dengan Konsep Eko-Hidrolik", Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2004.

Aulia, K.N., et.al., "Kepastian Hukum dan Keadilan Hukum dalam Pandangan Ilmu Komunikasi", *Journal Sains Student Research*, Vol. 2 No. 1, 2024.

Berliani, A., S. Fahmi, "Pemberian Ganti Kerugian Atas Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum di Indonesia dalam Perspektif Keadilan", *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7 No. 1, 2024.

Damanik, E.R., T. Farina, S. Nugraha, "Krisis Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia: Problematika Hak Konstitusional dan Pengabaian Aspirasi Rakyat", *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 5 No. 2, 2025.

Debby, C., F.W. Indarja, "Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Medan", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3, 2016.

Djidar, H., K. Kamal, I. Wijaya, "Analisis Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum di Kabupaten Luwu Timur", *Journal Publicuho*, Vol. 7 No. 4, 2024.

Esdarwati, Susila, "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogya-Bawen Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia", Disertasi, UPT Perpustakaan Undaris, Semarang, 2024.

Gallantry, Tegar, Yusuf Hidayat, Fokky Fuad Wasitaatmadja, "Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan

Umum Menurut Hukum Tanah Nasional dan Hukum Islam", Jurnal Universitas Al-Azhar Indonesia, Vol. VI No. 1, 2021.

Hamdi, H., "Penyelesaian Sengketa Penetapan Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum (Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012)", Jurnal Jus: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 2 No. 4, 2014.

Harjono, D.K., "Tanggung Jawab Penilai dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum", Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 2 No. 1, 2023.

Hulu, K.I., "Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dalam Bukti Kepemilikan Hak", Jurnal Panah Keadilan, Vol. 1 No. 1, 2021.

Hutama, A.R., "Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Indonesia", Journal of Comprehensive Science (JCS), Vol. 3 No. 6, 2024.

Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", Makalah disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, November 2011.

Kulah, M.R., T. Sumbu, R.M.S. Sarapun, "Tinjauan Yuridis Pembebasan Atas Tanah (Land Acquisition) untuk Kepentingan Umum dalam Penetapan Ganti Untung", Artikel Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2023.

Kusuma, A., "Ganti Rugi Tanah Sisa pada Pembangunan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar: Akibat Hukum dan Konflik Pertanahan", Jurnal Cepalo, Vol. 3 No. 1, 2019.

Lasut, R.F., "Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi Atas Tanah Menurut UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum", Lex et Societatis, Vol. 1 No. 4, 2013.

Lumantouw, A.C., "Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012", Lex et Societatis, Vol. 4 No. 5, 2016.

Mahi, I.A.K., S.I. Trigunarso, M.K. Skm, Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi, Kencana, Jakarta, 2017.

Mantili, R., "Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihadirkan dengan Asas Kepastian Hukum", Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 4 No. 1, 2019.

- Masrianairah, "Pelaksanaan Fungsi Ombudsman dalam Penyelesaian Maladministrasi Atas Alas Hak Kepemilikan Tanah yang Tumpang Tindih di Kalimantan Utara", Disertasi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2020.
- Muwahid, "Kewenangan Pemerintah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 8 No. 2, 2018.
- Nia, M.R.A.A., "Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Tol dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 di Kota Malang", Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2017.
- Papalia, I., "Konsep Musyawarah dan Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dalam Perspektif Hukum Islam", Disertasi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.
- Putra, I.G.A.A., "Penentuan Nilai Pasar Properti Tanah Kosong di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kabupaten Badung", *Portal: Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 15 No. 1, 2023.
- Rachmawati, I.N., "Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara", *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol. 11 No. 1, 2007.
- Rahardjo, M., *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif*, UIN Jakarta Press, Jakarta, 2011.
- Restyadi, A., "Peran Penilai Harga Tanah dalam Penentuan Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan New Yogyakarta International Airport)", Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.
- Rizkia, N.D., H. Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Penerbit Widina, Jakarta, 2023.
- Rokilah, R., "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule of Law", *Nurani Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2020.
- Rongiyati, S., "Eksistensi Lembaga Penilai Tanah dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum", *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol. 3 No. 1, 2016.
- Rumampuk, C.M., "Tinjauan Yuridis Ganti Rugi Lahan Masyarakat Menurut Peraturan Perundang Undangan Studi Kasus Pembangunan Bendungan Kuwil Kawangkoan", *Lex Privatum*, Vol. 15 No. 1, 2025.

- Sadono, A.H., "Penanganan Masalah Pertanahan Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020", *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, Vol. 2 No. 1, 2023.
- Safrielisa, A., "Persepsi Masyarakat Terhadap Proses Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Jalan Lingkar di Kecamatan Tenayan Raya)", Disertasi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2020.
- Santoso, Agus, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012.
- Sari, E.N., et.al., *Konsep Komunikasi Politik dalam Proses Pembangunan*, Kramantara JS, Yogyakarta, 2025.
- Setyani, A.N., "Analisis Kedudukan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Demak)", Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.
- Siregar, I.F., "Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai pada Balai Wilayah Sungai Sumatera II", Disertasi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2021.
- Suartina, Tine, "Analisis Hukum pada Kebijakan Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum di Indonesia", *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 10 No. 1, 2008
- Subekti, R., "Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum", *Yustisia*, Vol. 5 No. 2, 2016.
- Subekti, Rahayu, "Kebijakan Pemberian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum", *Jurnal Yustisia*, Vol. 5 No. 2, Agustus 2016.
- Suhartono, "Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 2013.
- Sungkawa, W., "Penegakan Hukum Bangunan Liar di Garis Sempadan Sepanjang Saluran Irigasi Kabupaten Cianjur", *Proceeding Justicia Conference*, Vol. 1, Februari 2022.

Syamsuni, S., "Rekonstruksi Regulasi Penentuan Nilai Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum", Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022

Tenong, S., M.D. Maroa, R. Setiawan, "Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021", Jurnal Yustisiabel, Vol. 5 No. 2, 2021.

Thalib, Abdul Rasyid, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Tobing, G.L., "Hukum Adat Sebagai Pranata Hukum Penyelesaian Perselisihan Melalui Musyawarah Mufakat dalam Lingkungan Masyarakat", To-Ra, Vol. 2 No. 3, 2016.

Wanapertiwi, A.P., "Kepastian Hukum Terhadap Sertipikat Tanah Berbasis Elektronik Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia", Tesis, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023.

Widiyoko, S., "Rekonstruksi Hukum Pemberian Besaran Ganti Kerugian (Ganti Keuntungan) Pembebasan Tanah untuk Kepentingan Umum Berbasis Nilai Keadilan", Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023.

Wijaya, T., "Pemenuhan Hak Atas Perumahan yang Layak Bagi Warga Terkena Dampak Proyek Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Warga Tambakrejo Kota Semarang)", Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022.

Zaini, A., "Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM", Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik, Vol. 11 No. 1, 2020.

D. Internet

Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>, diakses pada 29 April 2025.

Hamalatul Qur'ani, "Mengurai Benang Kusut Problematika Pembebasan Lahan Serta Solusinya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengurai-benang-kusut-problematika-pembebasan-lahan-serta-solusinya>, diakses pada 30 April 2025.

Islam NU, "Fasal tentang Masalah 'Ammah/ Kepentingan Umum (2)",
<https://islam.nu.or.id/syariah/fasal-tentang-masalah-amp8216ammah-kepentingan-umum-2-KssKa>, diakses 5 Mei 2025.

"Pengertian Pemerintahan",
<http://irwansahaja.blogspot.co.id/2015/02/pengertian-pemerintahan.html>, diakses pada 1 Mei 2025.

Serafica Gischa, "Indonesia Sebagai Negara Agraris, Apa Artinya?",
<https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/12/172322669/indonesia-sebagai-negara-agraris-apa-artinya?page=all>, diakses pada 29 April 2025.

Shani Ramadhan Rasyid, "Tujuan Mempelajari Ushul Fiqh: Memahami Dasar-Dasar Hukum Islam",
<https://www.liputan6.com/feeds/read/5903601/tujuan-mempelajari-ushul-fiqh-memahami-dasar-dasar-hukum-islam>, diperbarui 5 Maret 2025.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Lampiran I. Peninjauan Lokasi Normalisasi Sungai Bedera



Lampiran II. Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Objek Pengadaan Tanah



Lampiran III. Penyerahan Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak



Lampiran IV. Penyerahan Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak